

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/83/Kep/413.013/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/24/Kep/413.013/2014 TENTANG DEWAN PENGAWAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014-2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

: Bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pejabat dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Soegiri Lamongan periode 2014-2019, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/24/Kep/413.013/2014 dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Mengubah lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor: 188/24/Kep/413.013/2014, sebagaimana

tersebut dalam lampiran Keputusan ini,

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 16 Maret 2017

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Anggota Dewan Pengawas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI-PRIHATONO NIP 19670629 199803 1 004 Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/83/Kep/413.013/2017 Tanggal : 16 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN PERIODE 2014-2019

No.	Kedudukan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1	2	3
I	Ketua merangkap Anggota	Drs. M.S. Heruwidi, M.M.
II.	Anggota	 Dra. Sulastri, M.Si. dr. Taufiq Hidayat dr. H. Abdur Rifa'i, M.Kes. Joko Suranto, S.E., M.B.A.Ak.

BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, 🗸

19670629 199803 1 004